

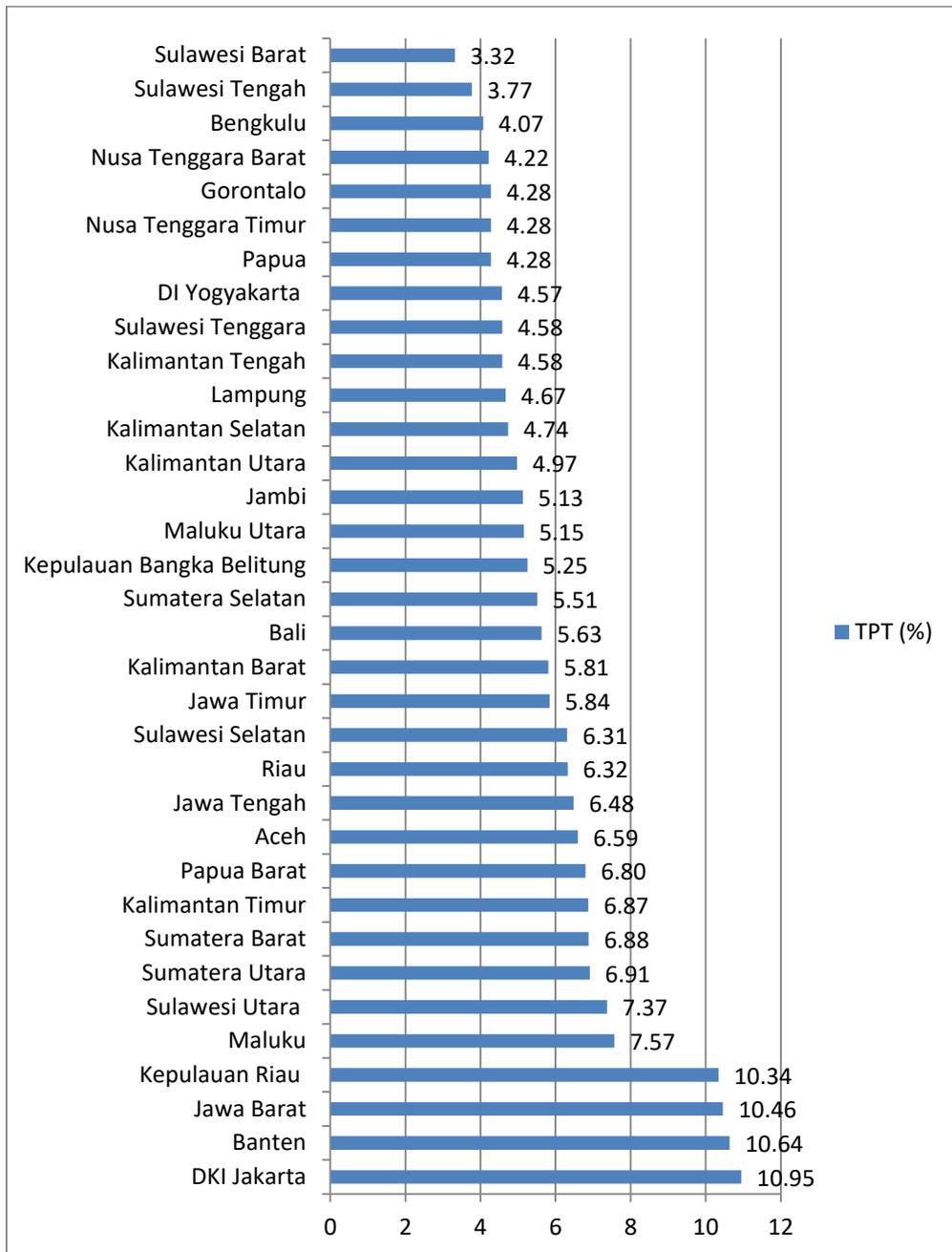
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengangguran menjadi salah satu masalah yang dialami setiap negara terutama negara berkembang salah satunya negara Indonesia. Hal ini karena negara berkembang kesulitan dalam mengendalikan peningkatan pengangguran. Negara berkembang saat ini masih belum bisa mengatasi tingkat pengangguran dengan baik, pembangunan yang dilakukan belum bisa menyediakan kesempatan kerja yang cukup untuk memberi peluang pada angkatan kerja yang ada, hal ini menjadikan angka pengangguran meningkat. Pengangguran merupakan sebutan bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, ataupun orang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak (Marini, 2019). Sedangkan pengangguran terbuka merupakan pengangguran yang muncul karena kurangnya lapangan pekerjaan daripada pertumbuhan tenaga kerja (Padang, 2019).

Umumnya banyak sekali individu yang ingin bekerja sesuai dengan tingkat pendidikan atau keterampilan yang mereka miliki. Meskipun banyak perusahaan yang menyediakan lapangan pekerjaan, namun perusahaan tersebut memerlukan tenaga siap pakai yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya. Sementara tenaga kerja yang tersedia tidak memiliki keterampilan atau tingkat pendidikan yang sesuai. Hal ini menjadi salah satu pemicu naiknya tingkat pengangguran.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2019

Gambar 1. 1
Grafik Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di 34 Provinsi per Agustus Tahun 2019

Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat pertama dari 34 provinsi dengan persentase sebesar 10.95% dan Provinsi Sulawesi Barat menduduki peringkat ke-34 dengan persentase TPT terendah sebesar 3.32%. Sementara itu Provinsi Kepulauan Riau menduduki peringkat ke-4 dengan persentase sebesar 10.34%. Jadi, dapat disimpulkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Riau masih terbilang cukup besar berdasarkan urutan peringkat dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2019.

Dengan menjadi salah satu wilayah/provinsi yang memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi ke-4 di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam menurunkan tingkat pengangguran masih belum efektif sepenuhnya. Berikut ini merupakan data tingkat pengangguran pada kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau selama 5 tahun terakhir berdasarkan kabupaten/kota.

Tabel 1. 1
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2015-2019 (Persen)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Batam	6,09	7,82	7,82	8,93	7,72
Tanjungpinang	6,27	7,11	7,11	5,49	5,64
Karimun	5,69	5,70	2,45	5,70	5,46
Bintan	6,88	8,08	8,08	5,89	8,01
Natuna	10,55	4,07	4,07	3,52	3,33
Lingga	4,01	3,23	3,23	3,65	4,01
Kepulauan Anambas	10,54		5,18	2,46	2,91
Kepulauan Riau	6,20	7,69	7,16	7,12	6,91

Sumber : Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, (2021)

Dari diatas dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terkecil di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kabupaten/kota adalah ditahun 2017 pada Kota Karimun dengan angka 2,45%. Sedangkan tingkat pengangguran terbesar terjadi ditahun 2015 pada Pulau Natuna dengan angka 10,55%. Berdasarkan tabel dapat dilihat tingkat pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau ini cukup tinggi.

Oleh karena itu peneliti akan lebih fokus pada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengangguran terbuka di wilayah/provinsi Kepulauan Riau sehingga kedepannya bisa lebih efektif lagi dalam menangani masalah pengangguran. Tiga faktor mendasar yang menjadi penyebab masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Ketiga faktor tersebut adalah ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan kerja, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan masih rendah. Lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja umumnya tidak sesuai dengan tingkat pendidikan atau keterampilan yang dimiliki. Umumnya perusahaan atau penyedia lapangan kerja membutuhkan tenaga yang siap pakai, artinya sesuai dengan pendidikan dan ketrampilannya, namun dalam kenyataan tidak banyak tenaga kerja yang siap pakai tersebut. Justru yang banyak adalah tenaga kerja yang tidak sesuai dengan job yang disediakan (Basuki, 2014).

Produk Domestik Regional Bruto atau biasa disebut PDRB memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran baik secara langsung maupun tidak langsung. Saat PDRB pada suatu wilayah meningkat, maka kemungkinan dapat

menyerap tenaga kerja diwilayah tersebut. Karena dengan meningkatnya PDRB kemungkinan kapastias produksi juga akan ikut meningkat. Sehingga ketika PDRB turun maka kemungkinan tingkat pengangguran akan meningkat. Menurut (Kuncoro, 2015:77) dalam (Arizal, 2019), salah satu indikator yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka adalah PDRB. Dalam Hukum Okun dinyatakan bahwa adanya hubungan yang signifikan dan negatif antara pengangguran dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu wilayah tertentu. Intinya adalah kenaikan 1% pengangguran akan menyebabkan penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 2% atau peningkatan output 1% akan menyebabkan pengngguran berkuang 1%.

Angka pengangguran disuatu wilayah dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Apabila angka pengangguran rendah, maka pertumbuhan ekonomi tercermin baik dan meningkatkan kualitas standar hidup penduduk sekaligus meningkatkan pemerataan pendapatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Namun sebaliknya, apabila angka pengangguran tinggi, maka pertumbuhan ekonomi tercermin buruk.

Selain PDRB, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM juga memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran. Menurut Todaro, 2013 dalam (Anwar, 2020) pada penelitiannya beliau menjelaskan bahwa Pembangunan ekonomi merupakan upaya perubahan struktural yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan penduduk. Pembangunan ekonomi proses multidimensional yang melibatkan bermacam-macam perubahan

mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan wilayah, pengentasan kemiskinan serta penurunan tingkat pengangguran.

Menurut Arifin, 2011 dalam (Muminin, 2017) secara umum penduduk adalah setiap orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di dalam wilayah suatu negara dalam waktu yang cukup lama. Menjelaskan bahwa jumlah penduduk menunjukkan total manusia atau penduduk yang menempati suatu wilayah pada jangka waktu tertentu. Malthus, berpendapat tentang hubungan antara populasi, upah riil, dan inflasi. Ketika populasi buruh tumbuh lebih cepat dari pada produksi makanan, maka upah riil turun, karena pertumbuhan penduduk menyebabkan biaya hidup yaitu biaya makanan naik ketika upah riil di suatu wilayah tinggi.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka jumlah penduduk cukup padat di Indonesia. Padatnya jumlah penduduk tersebut akan mempengaruhi adanya tingkat pengangguran. Menurut (Azizah,2016) dalam (Muminin, 2017), dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk, maka jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja juga ikut meningkat. Angkatan kerja membutuhkan lapangan pekerjaan dan umumnya di Negara berkembang laju pertumbuhan penduduk (termasuk angkatan kerja) lebih besar daripada laju pertumbuhan lapangan kerja. Oleh karena itu tidak semua angkatan kerja bisa mendapatkan pekerjaan dan akhirnya menganggur teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peran pemerintah. Berikut

merupakan data jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kabupaten/kota.

Tabel 1. 2
Jumlah Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2015-2019 (Juta Jiwa)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Batam	1 188 985	1 236 399	1 283 196	1 329 773	1 376 009
Tanjungpinang	202 215	204 735	207 057	209 280	211 583
Karimun	225 298	227 277	229 194	231 145	232 797
Bintan	153 020	154 584	156 313	157 927	159 403
Natuna	74 520	75 282	76 192	76 968	77 771
Lingga	88 591	88 971	89 330	89 501	89 781
Kepulauan Anambas	40 414	40 921	41 412	41 927	42 309
Kepulauan Riau	1 973 043	2 028 169	2 082 694	2 136 521	2 189 653

Sumber : Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, (2020)

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2015 jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 1.973,043 jiwa dalam 5 tahun terakhir jumlah penduduk terus mengalami kenaikan, di tahun 2019 jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 2.189,653 jiwa. Tingginya angka dari jumlah penduduk ini dapat mempengaruhi tingkat pengangguran pada Provinsi Kepulauan Riau.

Selain jumlah penduduk, upah juga menjadi salah satu masalah dalam ketenagakerjaan. Dalam (UU RI, NO.13, 2003), pengertian upah dijelaskan pada Pasal 1 ayat 30 tentang Ketenagakerjaan. Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau

peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dalam Islam upah disebut dengan istilah ijarah. Ijarah adalah transaksi untuk mengambil manfaat dari barang ataupun jasa yang telah ditentukan jangka waktu ataupun alat tukar yang diketahui. Menurut (Adawiyah, 2016), ijarah adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Apabila dalam konteks akad upah-mengupah, maka ijarah ialah menjual tenaga atau kekuatan. Menurut (Hafizah, 2020), akad ijarah diperbolehkan berdasarkan nash Al-qur'an serta hadis Nabi saw seperti yang berasal dari Ibnu Mâjjah dalam kitabnya Sunan Ibn Mâjjah dari Ibnu Umar r.a berkata, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْوَلِيدِ الْبِشْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **أَعْطُوا الْإِجَارَةَ أَجْرَهُ، وَبَلَّ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ**

Artinya: *Mewartakan kepada kami al-'Abbâs Ibn al-Walîdi al-Dimsyaqi berkata: mewartakan kepada kami Wahb Ibn Sa'id Ibn 'Athiyyah al-Sulamiy berkata: mewartakan kepada kami 'Abdurrahmân Ibn Zaid Ibn Aslam dari ayahnya, dari Abdullah Ibn 'Umar berkata: Bersabda Rasulullah saw: "Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya." {HR. Ibnu Majjah}. Rasulullah juga bersabda:*

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغَطْرِبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ الْوَاسِطِيُّ، ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، ثنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **<< مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلِي عِلْمُهُ أَجْرَتُهُ >>**

Artinya: *Mewartakan kepada kami akan dia Abû Ahmad al-Ghirthifiyyu, tsanâ Muhammad al-Wâsithiyyu, tsanâ Khâlid dari Abî Hanîfah dari Hammâd dari Ibrâhim dari Abî Sa'id al-Khudriyyi dan dari Abî Hurairah berkata: Bersabda Rasulullah saw "Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka beritahukanlah upahnya".*

Hadis diatas menjelaskan bahwa apabila pekerjaan sudah selesai dikerjakan maka upahnya harus segera dibayarkan, tanpa ditunda-tunda. Hal ini karena biasanya para pekerja ingin langsung menikmati hasil jerih payahnya setelah menyelesaikan kewajibannya (Hafizah, 2020).

Upah memiliki titik minimum atau dikenal dengan upah minimum. Upah minimum ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan yang diberikan untuk para buruh/pekerja. Upah Minimum merupakan batas minimum upah yang menjadi patokan para pengusaha atau pelaku industri untuk memberi upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Hal ini dikarenakan pemenuhan kebutuhan layak bagi setiap provinsi berbeda-beda, maka dari itu disebut sebagai UMK (Sutanty, 2017).

Kenaikan tingkat upah dipengaruhi oleh beberapa indikator seperti kebutuhan hidup layak, indeks harga konsumen dan beberapa indikator lainnya. Pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat (Helvira, 2020). Artinya jika tingkat upah tinggi maka jumlah pengangguran juga tinggi, tingginya tingkat upah tidak selalu berdampak positif pada permintaan tenaga kerja karena tidak semua perusahaan mampu membayar sesuai tingkat upah tertentu. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau pada tabel 1.3, dapat dilihat bahwa tingkat UMK di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2010 hingga 2019 terus

mengalami peningkatan. Berikut ini merupakan data UMK Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 1. 3
Tingka Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Batam	1 188 985	1 236 399	1 283 196	3 523 427	3 806 358
Tanjungpinang	1 955 000	2 179 825	2 359 661	2 565 187	2 771 172
Karimun	2 168 838	2 418 254	2 617 760	2 845 766	3 074 281
Bintan	2 372 213	2 645 017	2 863 231	3 112 618	3 362 561
Natuna	2 020 000	2 252 300	2 438 115	2 650 475	2 863 308
Lingga	1 974 000	2 201 010	2 382 593	2 590 116	2 798 102
Kepulauan Anambas	2 118 000	2 425 110	2 697 935	2 932 925	3 168 439
Kepulauan Riau	1 954 000	2 178 710	2 358 454	2 563 875	2 769 754

Sumber : Sumber Badan Pusan Statistik (2020)

Dalam suatu wilayah angka pengangguran dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Apabila angka pengangguran rendah, maka pertumbuhan ekonomi tercermin baik dan meningkatkan kualitas standar hidup penduduk sekaligus meningkatkan pemerataan pendapatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Namun sebaliknya, apabila angka pengangguran tinggi, maka pertumbuhan ekonomi tercermin buruk. Begitupula dengan investasi, semakin tinggi tingkat investasi di suatu wilayah maka akan menurunkan tingkat pengangguran dan semakin rendah tingkat investasi maka tingkat pengangguran akan naik.

Dalam perekonomian, pengangguran selalu menjadi masalah yang mempengaruhi produktivitas dan mengurangi pendapatan masyarakat sehingga menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Tingginya tingkat

pengangguran juga dapat meningkatkan jumlah kriminalitas, kemiskinan dan juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Pengaruh PDRB, IPM, Jumlah Penduduk, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019 (Studi Kasus 6 Kabupaten/Kota)**”.

B. Batasan Masalah

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran disetiap daerah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan beberapa masalah yang terdapat pada latar belakang. Maka penulis memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti hanya melakukan penelitian pengaruh PDRB, IMP, Jumlah Penduduk, dan UMK terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau dengan studi kasus 6 kabupaten/kota. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh PDRB, IMP, Jumlah Penduduk, dan UMK terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)?

3. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)?
4. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumus masalah diatas, maka tujuan dari penilitan ini yaitu:

1. Untuk menganalisa pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT).
2. Untuk menganalisa pengaruh anantara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT).
3. Untuk menganalisa pengaruh antara Jumlah Penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT).
4. Untuk menganalisa pengaruh anantara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi dan juga rujukan bagi penelitian berikutnya mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau.

2. Manfaat Bagi Peneliti

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai pengaruh mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau.

3. Manfaat Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau ataupun pemerintah provinsi dan kota lainnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan rujukan informasi terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Sehingga mampu untuk meningkatkan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi daerah.